

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Budaya politik merupakan suatu hal yang tidak bisa lepas dari perkembangan politik suatu negara, apalagi negara yang menganut sistem demokrasi. Dimana budaya politik ini dapat mempengaruhi proses dan hasil dari sistem demokrasi itu sendiri. Budaya politik menurut Gabriel Almond dalam Ismid Hadad (1981) mengemukakan bahwa budaya politik adalah suatu pola orientasi yang khusus dari suatu tindakan politik yang sudah tertanam dalam setiap sistem politik.¹ Definisi budaya politik menurut Almond dan Verba budaya politik merupakan sikap individu terhadap sistem politik dan komponen-komponennya, juga sikap individu terhadap peranan yang dapat dimainkan dalam sistem politik.²

Budaya politik dapat diartikan sebagai suatu orientasi atau pola, kebiasaan masyarakat dalam memandang dan merespon suatu sistem politik yang mana tindakan yang dilakukan oleh masyarakat ini mempengaruhi sistem politik itu sendiri. Budaya politik meliputi masalah legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijakan pemerintah, kegiatan partai-partai politik, perilaku aparat negara, partisipasi masyarakat dalam Pemilu, serta gejolak masyarakat terhadap kekuasaan yang memerintah.³

Budaya politik menjadi penentu bagi masyarakat dalam mengambil tindakan terhadap sistem politik, yang mana tindakan ini dapat berupa penolakan, penerimaan atau bahkan tindakan

¹ Beddy Iriawan Maksudi. *Sistem Politik Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta

² Ibid hlm. 50

³ Ibid hlm. 45

yang ditunjukkan secara aktif oleh masyarakat dalam merespon sistem politik itu sendiri. Budaya politik juga mempengaruhi jalannya Pemilu di suatu negara apalagi negara yang menganut sistem demokrasi termasuk Indonesia. Sehingga tidak dipungkiri masyarakat yang menganut budaya politik yang berbeda-beda disetiap negara yang menentukan hasil dari Pemilu itu sendiri.

Pilkada memang merupakan suatu hal yang paling dinantikan oleh masyarakat untuk menempati jabatan di daerah. Sehingga pilkada tidak luput dari berbagai aksi kampanye yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan suara dari berbagai pihak, baik dukungan dari partai politik, organisasi masyarakat (Ormas), pengusaha maupun masyarakat luas. Para politisi ditingkat daerah akan mengerahkan kemampuannya untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat untuk memenangkan Pilkada.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merubah pemilihan umum kepala daerah menjadi pemilihan kepala daerah langsung dimana pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah serentak. Dimana pada pemilihan tersebut, masyarakat langsung memilih para calon yang dianggap mampu mewakili dan mampu memimpin dengan baik bagi masyarakat tersebut. Pada tanggal 27 Juni 2018 Indonesia telah mengadakan Pilkada serentak yang diikuti oleh beberapa daerah, dan sebelumnya juga telah dilaksanakan pada Tahun 2015 dan 2017.

Pada masa Pilkada akan banyak muncul fenomena-fenomena yang dapat mempengaruhi seseorang dalam menentukan pilihannya seperti pengaruh dari orang terdekat, kerabat, media atau orang lain (tim sukses/relawan). Banyak cara yang akan dilakukan oleh pihak terkait untuk mempengaruhi seseorang dalam menentukan pilihannya, mulai dari pendekatan politik, juga pendekatan ekonomi dan hubungan sosial kepada masyarakat, serta pendekatan identitas dan budaya pun tak jarang dilakukan. Dari fenomena yang terjadi pada masa Pilkada dapat kita

gambarkan budaya politik masyarakat pada suatu daerah. Dilihat bahwa pada masa Pilkada masyarakat pada daerah dipengaruhi oleh budaya politik, tidak mengherankan bila kita melihat sejarah pertumbuhan masyarakat tidak luput dari budaya politik yang ada disuatu daerah. Demikian halnya dengan kehidupan masyarakat daerah juga sangat dipengaruhi oleh budaya politik.

Menurut Almond dan Verba budaya politik adalah suatu sikap orientasi yang khas dari warga Negara terhadap sistem politik dengan aneka ragam bagiannya dan sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem politik tersebut. Istilah budaya politik mengacu kepada orientasi politik dan bagian-bagian yang lain serta sikap terhadap peranan masyarakat dalam sistem tersebut.⁴

Dennis Kavanagh mengatakan ada dua alasan yang penting untuk dipelajari yaitu, *pertama* sikap warga negara terhadap sistem politik jelas mempengaruhi macam-macam tuntutan yang diminta, cara tuntutan-tuntutan itu diutarakan, respon dan golongan elit cadangan dukungan yang baik terhadap rezim yang berkuasa. Orientasi-orientasi inilah yang menentukan pelaksanaan sistem politik. *Kedua*, dengan mengerti akan sifat dan hubungan antara budaya politik dengan pelaksanaan sistem politik. Dengan ini kita akan lebih menghargai cara-cara yang mungkin akan membawa perubahan-perubahan politik yang pesat. Hal ini relevan dengan kebanyakan ahli politik yang berkecimpung dalam melokalisasi persyaratan-persyaratan pemerintah yang stabil dan demokratis.⁵

⁴Almond, 1984: *Budaya politik*. Bumi Aksara.

⁵Beddy Iriawan Maksudi, *Sistem Politik Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Budaya politik merupakan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat. Budaya politik suatu masyarakat akan berbeda dengan budaya politik masyarakat lainnya. Menurut Almond dan Verba dalam Nazarudin Syamsudin, budaya politik adalah sebagai sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam serta peranan warga negara di dalam sistem tersebut.⁶ Sehingga tidak heran bila dalam pilkada adanya sikap primordialisme.⁷ Jika seseorang calon memiliki latar belakang yang sama dengan ikatan primordialisme masyarakat, maka hal tersebut menjadi alternatif pilihan masyarakat.

Menurut Almond dan Verba ketika mengaitkan budaya politik dengan orientasi dan sikap seseorang terhadap sistem politik, serta sikap dan peranan dalam sistem politik yang mana artinya jika ingin melihat budaya politik suatu masyarakat haruslah merujuk pada sistem politik seperti yang diinternalisasikan ke dalam kognitif, afektif, dan evaluatif. Almond dan Verba juga mengklasifikasikan budaya politik pada tiga tipe-tipe budaya politik yaitu budaya politik parokial, budaya politik kaula dan budaya politik partisipan.

Pertama, budaya politik parokial adalah budaya politik yang tingkat partisipasi politik masyarakat sangat rendah yang disebabkan faktor kognitif (misalnya tingkat pendidikan relatif rendah). Secara relatif budaya politik parokial berlangsung dalam sistem tradisional yang lebih sederhana sehingga spesialisasi politik berada dalam jenjang yang sangat rendah dan juga dalam budaya politik parokial juga menyatakan adanya harapan-harapan akan perubahan-perubahan

⁶Ibid hlm. 50

⁷Primordialisme adalah suatu paham atau ide dari masyarakat yang mempunyai kecenderungan untuk berkelompok sehingga terbentuklah suku-suku bangsa. Pengelompokan ini tidak hanya pada pembentukan suku bangsa saja, tapi juga pada ideologi agama, dan juga kepercayaan. Primordialisme oleh sosiologi digunakan untuk menggambarkan adanya ikatan-ikatan seseorang yang dibawa sejak lahir, seperti suku bangsa, daerah asal, dan agama.

komparatif yang diasosiasikan oleh sistem politik. *Kedua*, budaya politik kaula atau subjek adalah masyarakat yang bersangkutan sudah relatif maju tetapi masih bersifat pasif. Para subyek menyadari akan otoritas pemerintah, mereka secara efektif diarahkan terhadap otoritas tersebut dan mereka mungkin menunjukkan kebanggaannya terhadap sistem itu. Akan tetapi hubungan terhadap sistem secara umum dan hasilnya bersifat pasif. Ada bentuk kompetensi yang terbatas dan tersedia di dalam budaya politik kaula. *Ketiga*, budaya politik partisipan adalah budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi. Dengan kata lain bentuk kultur dimana anggota masyarakat cenderung diorientasikan secara eksplisit terhadap sistem sebagai keseluruhan dan terhadap struktur dan proses politik serta administratif.⁸

Dalam konteks ini, peneliti ingin membahas tentang pengaruh pergeseran budaya politik terhadap pemilihan kepala daerah yang merujuk pada kekalahan Emzalmi-Desri Ayunda dalam pemilihan Walikota Padang pada Tahun 2018, yang mana Emzalmi bersaing dengan Mahyeldi yang merupakan walikota periode sebelumnya. Dalam hal ini peneliti ingin melihat keterkaitan pengaruh pergeseran budaya politik masyarakat Kuranji terhadap kekalahan Emzalmi dalam pemilihan Walikota Padang Tahun 2018.

Di Provinsi Sumatera Barat khususnya Kota Padang, ada empat kota/kabupaten yang ikut melaksanakan Pilkada serentak untuk periode 2019-2024, salah satunya adalah Kota Padang. Pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang terdapat dua pasangan calon yaitu pasangan Mahyeldi-Hendri Septa dan pasangan Emzalmi-Desri Ayunda. Pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang dimenangkan oleh Mahyeldi-Hendri Septa, sedangkan Emzalmi-Desri

⁸ Almond, 1984, Op.cit, hlm 20-22

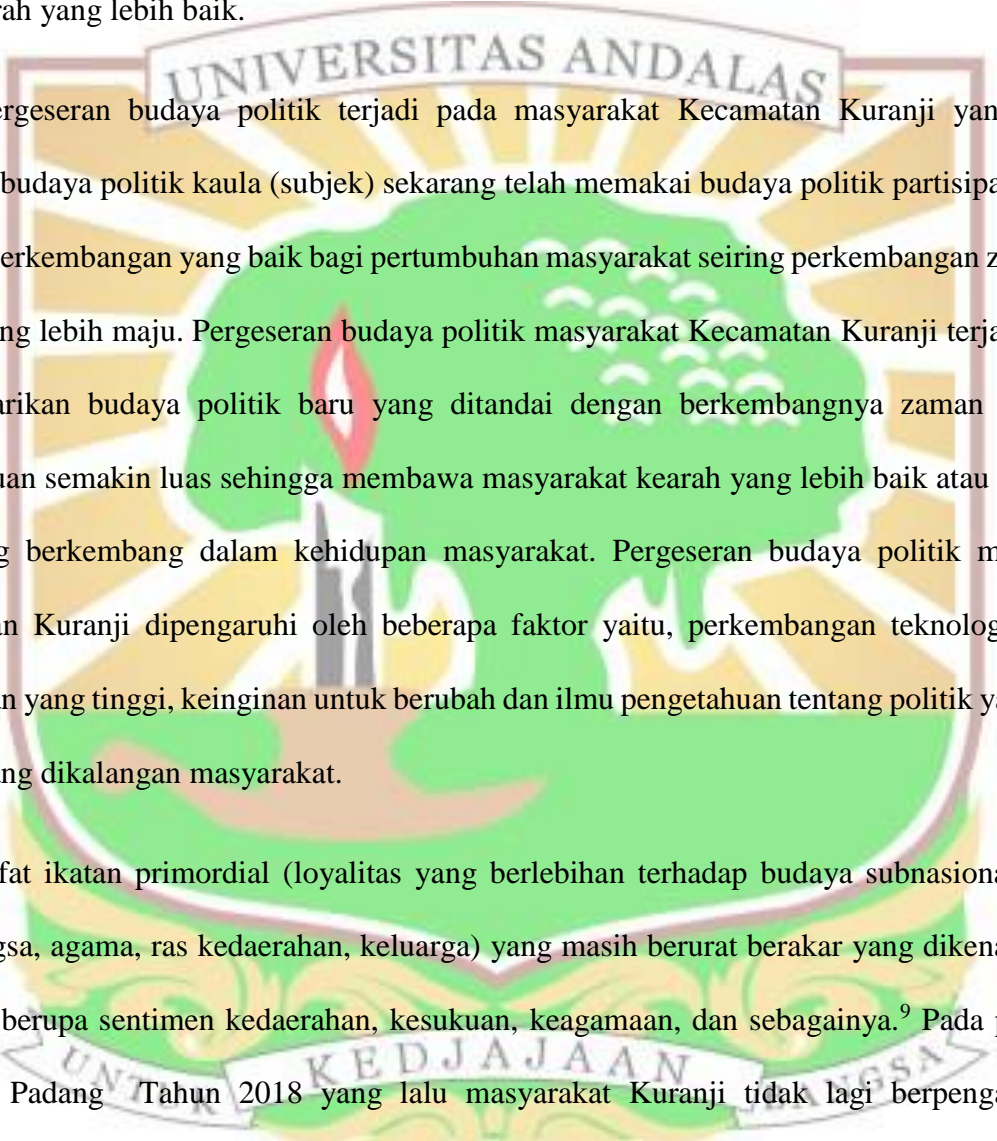
Ayunda mengalami kekalahan. Salah satu daerah kekalahan dari pasangan Emzalmi-Desri Ayunda adalah Kecamatan Kuranji.

Kekalahan Emzalmi dalam pemilihan Walikota Padang ini menjadi hal yang menarik untuk diteliti, karena dalam hal ini Emzalmi yang merupakan putra daerah Kuranji dikalahkan oleh Mahyeldi yang merupakan orang luar Kota Padang. Menariknya Emzalmi kalah telak di daerah kelahirannya yaitu Kecamatan Kuranji. Masyarakat Kuranji tidak lagi terpengaruh oleh latar belakang Emzalmi sebagai putra daerah Kecamatan Kuranji melainkan masyarakat sudah mulai melihat dari sisi yang lebih objektif dalam memilih pemimpin. Hal ini menjadikan masyarakat Kuranji yang semula masih memakai budaya politik subjek dimana masyarakat masih melihat latar belakang calon pemimpin dari putra daerah atau dari hubungan yang saling berkaitan satu dengan yang lain antara masyarakat dengan si calon pemimpin menjadi masyarakat yang memakai budaya politik partisipan.

Berbeda dengan sekarang masyarakat sudah bergeser pada budaya politik partisipan dimana masyarakat sudah beranjak memilih pemimpin berdasarkan kinerja, kiat-kiat atau visi misi, dan sosialisasi yang dilakukan oleh si calon untuk untuk mengkampanyekan dirinya kepada masyarakat agar dapat dipilih dalam Pemilu. Pergeseran budaya politik ini menjadi hal yang menarik untuk dikaji karena dalam hal ini pengaruh pergeseran budaya politik dapat berdampak besar pada pemilihan masyarakat dalam Pemilu.

Pergeseran budaya politik merupakan perubahan dalam cakupan kecil dimana mengalami perubahan budaya politik dari yang lama ke budaya politik yang baru. Dimana masyarakat yang semula memiliki budaya politik yang parokial bergeser menjadi masyarakat yang memakai budaya politik kaula (subjek) dan yang semula memakai budaya politik kaula bergeser menjadi

masyarakat yang memakai budaya politik partisipan. Artinya masyarakat sudah memiliki keinginan dan ilmu pengetahuan untuk dapat berkembang dan tumbuh sesuai dengan perkembangan zaman yang semula masih tertinggal menjadi masyarakat yang sudah bergerak maju kearah yang lebih baik.



Pergeseran budaya politik terjadi pada masyarakat Kecamatan Kuranji yang semula memakai budaya politik kaula (subjek) sekarang telah memakai budaya politik partisipan. Hal ini menjadi perkembangan yang baik bagi pertumbuhan masyarakat seiring perkembangan zaman dan kearah yang lebih maju. Pergeseran budaya politik masyarakat Kecamatan Kuranji terjadi karena adanya tarikan budaya politik baru yang ditandai dengan berkembangnya zaman dan ilmu pengetahuan semakin luas sehingga membawa masyarakat kearah yang lebih baik atau nilai-nilai baru yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Pergeseran budaya politik masyarakat Kecamatan Kuranji dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, perkembangan teknologi, tingkat pendidikan yang tinggi, keinginan untuk berubah dan ilmu pengetahuan tentang politik yang sudah berkembang dikalangan masyarakat.

Sifat ikatan primordial (loyalitas yang berlebihan terhadap budaya subnasional, seperti suku bangsa, agama, ras kedaerahan, keluarga) yang masih berurat berakar yang dikenal melalui indikator berupa sentimen kedaerahan, kesukuan, keagamaan, dan sebagainya.⁹ Pada pemilihan Walikota Padang Tahun 2018 yang lalu masyarakat Kuranji tidak lagi berpengaruh atau berpatokan pada ikatan primordial akan tetapi masyarakat sudah bergerak lebih maju dengan melihat pemimpin dengan cara objektif.

⁹Mksudi, op.cit. hlm. 72

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa, Emzalmi yang merupakan putra daerah Kuranji malah mengalami kekalahan di daerah kelahirannya sendiri. Padahal dari data survei di kecamatan Kuranji, pasangan Mahyeldi-Hendri Septa memperoleh suara 24.347 (45,68%), dan pasangan Emzalmi-Desri Ayunda memperoleh suara sebesar 29.918 (54,32%).¹⁰ Dari data tersebut, pasangan Emzalmi-Desri Ayunda yang semula diprediksi akan meraih kemenangan di Kecamatan Kuranji, ternyata tidak terbukti.

Tabel 1.1

Perolehan Suara di Kecamatan Kuranji

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Mahyeldi Ansharullah – Hendri Septa	54,6%
2.	Emzalmi – Desri Ayunda	45,4%

Sumber: KPU Kota Padang

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa perolehan suara yang diperoleh oleh Mahyeldi-Hendri Septa sebanyak 54,6% dan suara yang diperoleh oleh Emzalmi-Desri ayunda sebanyak 45,4% suara. Dengan ini pemilihan walikota Padang dimenangkan oleh pasangan Mahyeldi-Hendri Septa. Hasil rekapitulasi dari keseluruhan perolehan suara kota Padang Mahyeldi-Hendri septa memperoleh hasil sebanyak 212.526 atau 62,92% suara. Sedangkan pasangan Emzalmi-Desri ayunda hanya memperoleh suara sebanyak 125.238 suara atau 37,08% suara.¹¹

Namun sebaliknya pada pemilihan kepala daerah atau pemilihan Walikota Padang tahun 2013 yang mana Emzalmi berpasangan dengan Mahyeldi memenangkan Pemilu khususnya di Kecamatan Kuranji dan menjadi Walikota Padang periode 2014-2019, mereka mengalahkan kandidat yang lain dan mendapatkan suara terbanyak dan selisih suara yang diperoleh dari kandidat

¹⁰<https://m.gosumbar.com>. (diakses pada 22 November 2018)

¹¹ <https://kumparan.com>

lain sangat jauh. Pada Pilwako Padang Tahun 2013 yang lalu terdapat 10 kandidat calon Walikota Padang yaitu kandidat yang pertama, Emma-Wahyu, Michel-Januardi, Desri- James, Asnawi-Surya, Ibrahim-Nardi, Kandris-Indra, Maigrus-Armalis, Indra-Yefri, Syamsuar-Mawardi, dan Mahyeldi-Emzalmi. Dari Pemilu Tahun 2013 ini memperoleh hasil kemenangan dari Mahyeldi dan Emzalmi sebagai Walikota Padang. Suara yang diperoleh yaitu 50,29%.

Tabel 1.2

Perolehan Suara di Kecamatan Kuranji pada Pilkada Tahun 2013

NO	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Ema Rohana-Wahyu Iramana Putra	7,03%
2.	Muhammad Ichlas El Qudsi-Januadi Sumka	10,53%
3.	Desri Ayunda-James Hellyward	11,29%
4.	Asnawi Bahar-Surya Budi	2,32%
5.	Ibrahim-Nardi Gusman	3,63%
6.	Kandris Asrin- Indra Dwipa	3,96%
7.	Maigus Nasir-Armalis	18,66%
8.	Indra Jaya-Jefri Hendri Darmi	1,37%
9.	Syamsuar Syam-Mawardi	2,97%
10.	Mahyeldi-Emzalmi	38.24%

Sumber: Ranahweb.com

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dari sepuluh kandidat pasangan calon Mahyeldi-Emzalmi memperoleh perolehan suara tertinggi di Kecamatan Kuranji, dimana Mahyeldi-Emzalmi mengalahkan 10 kandidat di Kecamatan Kuranji. Dari perolehan suara di atas dapat dikatakan bahwa kecenderungan masyarakat Kuranji memilih Mahyeldi-Emzalmi dikarenakan Mahyeldi sendiri pernah menjabat sebagai Wakil Walikota Padang periode sebelumnya yang berpasangan dengan Fauzi Bahar dan juga didukung oleh latar belakang Emzalmi sebagai putra

daerah Kecamatan Kuranji sendiri, sehingga budaya politik yang dipakai masyarakat Kuranji masih memakai budaya politik subjek dimana masyarakat lebih melihat kepada latar belakang calon. Dalam wawancara peneliti dengan informan Jalius:

“Katiko Pemilu 2013 patang ko ambo iyo mamilih Mahyeldi-Emzalmi karano Mahyeldi kan lah pernah juo menjabat jadi Wakil Walikota Padang samo Fauzi Bahar ditambah pulo Emzalmi ko kan urang awak juo kan, rancaklah dipiliah urang awak dari pado urang lua”

(Terjemahannya, Pada Pemilu tahun 2013 yang lalu saya memilih Mahyeldi-Emzalmi karena Mahyeldi sendiri sudah pernah menjabat sebagai Wakil Wali Kota Padang periode sebelumnya dengan Fauzi Bahar dan ditambah lagi latar belakang Emzalmi yang merupakan putra daerah Padang khususnya Kecamatan Kuranji, jadi lebih baik kita memilih orang kampung kita daripada orang luar).

Dari wawancara di atas dapat dikatakan sifat primordial pada Pemilu Tahun 2013 yang lalu masih melekat didalam masyarakat, sehingga pilihan yang diambil tidak lagi objektif. Hal ini sangat melekat dalam budaya politik kaula yang melihat pemimpin berdasarkan ikatan primordial. Pergeseran budaya politik masyarakat Kecamatan Kuranji dapat dilihat dari perilaku memilih masyarakat Kuranji. Perilaku memilih merupakan pola perilaku atau sikap masyarakat dalam menentukan pilihannya dalam Pemilu. Dalam perilaku memilih terdapat tiga pendekatan yaitu, yang pertama adalah pendekatan sosiologis yang menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seseorang dalam dalam menentukan perilaku memilih berdasarkan karakteristik sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial. Pendekatan sosiologis ini meliputi pekerjaan, pendidikan, agama, tempat tinggal, jenis kelamin, umur dan lainnya. Pendekatan ini sangat berperan penting dalam memahami perilaku politik seseorang.¹²

Kedua, pendekatan psikologis dimana dalam pendekatan ini menekankan tiga aspek psikologis sebagai kajian utama yaitu ikatan emosional kepada suatu partai politik, orientasi

¹² Riski Dwi Jayani, Perilaku Memilih Masyarakat Dalam Pilkada Kota Surabaya Tahun 2015, 2016.

terhadap isu-isu dan orientasi terhadap kandidat. Ketiga, pendekatan rasional yang mana dalam pendekatan ini terdapat faktor-faktor situasional yang dapat berperan dalam mempengaruhi pilihan politik seseorang. Dengan begitu, para pemilih tidak hanya pasif tetapi juga aktif, bukan hanya terbelenggu oleh karakteristik sosiologis tetapi juga bebas bertindak.¹³

Dalam penelitian ini masyarakat Kuranji memakai pola pikir yang rasional dimana masyarakat tidak memandang pemimpin dari latar belakang, agama maupun ras namun masyarakat memilih berdasarkan kinerja calon, visi misi dan bagaimana sosok calon berinteraksi dengan masyarakat sehingga dalam memilih masyarakat lebih objektif. Dari latar belakang di atas peneliti berasumsi bahwa adanya pergeseran budaya politik masyarakat Kuranji yang semula memakai budaya politik kaula atau subjek bergeser pada budaya politik partisipan sehingga mempengaruhi kekalahan Emzalmi di Kecamatan Kuranji pada Pilwako 2018.



¹³ Ibid.